



Kebijakan Moneter Di Indonesia

Sarifatus Sakdiya¹, Rini Puji Astuti², Laila Zuhro³, Mar'i Muhammad Yudha⁴

^{1, 2, 3, 4} Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
sarifatus.sakdiya05@gmail.com ¹

Abstrak

Perkembangan ekonomi Indonesia sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Periode pra-krisis ekonomi 1997 menunjukkan berbagai fase, mulai dari masa setelah kemerdekaan (1945-1952) hingga deregulasi dan liberalisasi ekonomi (1983-1997). Pasca-krisis ekonomi 1997, Bank Indonesia berfokus pada stabilitas makro ekonomi melalui penyesuaian suku bunga dan kebijakan nilai tukar, dengan pendekatan yang beralih dari berbasis kuantitas (2000-2004) menuju berbasis harga (2004-sekarang). Pendekatan berbasis kuantitas mengendalikan jumlah uang beredar, sementara pendekatan berbasis harga memanfaatkan suku bunga sebagai variabel kunci. Penyesuaian kebijakan moneter dan nilai tukar ini dirancang untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Dalam kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap, mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Kebijakan devisa diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan sistem devisa bebas, tanpa batasan jumlah uang yang boleh dibawa masuk dan keluar. Cadangan devisa, yang dikelola oleh Bank Indonesia, penting untuk mendukung stabilitas moneter dan ekonomi makro. Kebijakan devisa bertujuan mendorong ekspor, mengendalikan impor, dan menjaga stabilitas pasar valuta asing.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Nilai Tukar, Devisa, Krisis Ekonomi, Kebanksentralan

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Otoritas Moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (Warjiyo dan Solihin, 2003). Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro dan memiliki hubungan yang sangat terkait. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas inflasi dan terciptanya sistem keuangan yang dapat melaksanakan fungsi intermediasi secara seimbang. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor riil dan keuangan melalui mekanisme berbagai jalur transmisi kebijakan moneter yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar yang berlangsung melalui sistem perbankan (Warjiyo, 2004).

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam kerangka kebijakan moneter, seiring dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia telah memperkuat perannya dalam memperbaiki sistem moneter dan mengelola stabilitas ekonomi. Selama periode ini, berbagai instrumen kebijakan telah digunakan, mulai dari suku bunga acuan hingga intervensi mata uang, dalam rangka mencapai target-target kebijakan yang ditetapkan.

Pada tahun-tahun terkini, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan baru dalam hal kebijakan moneter. Pandemi COVID-19, misalnya, telah menghadirkan tekanan besar terhadap perekonomian, memaksa Bank Indonesia untuk merespons dengan kebijakan yang tepat guna untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, perubahan dalam dinamika global, termasuk kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan ketidakpastian perdagangan internasional, juga mempengaruhi kebijakan moneter Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau dan menganalisis kebijakan moneter terkini di Indonesia serta implikasinya terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan stabilitas keuangan. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia.

METODE

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kebijakan Moneter di Indonesia. Objek Penelitian adalah apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian dengan persoalan sekiranya perlu pemahaman agar dapat menentukan sebuah penelitian yang baik Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah metode pengumpulan, penyajian data, peringkasan, sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alami dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang sedang terjadi dan dilakukan dengan jalan metode yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan teori dan bukti yang ada. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai Kebijakan Moneter di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode Sebelum dan Sesudah Krisis 1997

Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter tidak hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana reaksi Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003).

1. Periode Pre-Krisis Ekonomi 1997

- a. Periode 1945–1952: Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola sistem moneter. Pada periode ini, kebijakan moneter masih dalam tahap awal pengembangan.
- b. Periode 1953–1967: Pada masa ini, Bank Indonesia (BI) mulai mengambil peran aktif dalam mengendalikan inflasi dan mengatur kebijakan moneter. BI juga memperkenalkan instrumen kebijakan seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Periode 1968–1997:
 - Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (1968–1972): Setelah krisis ekonomi pada akhir 1960-an, BI fokus pada stabilisasi dan pemulihan ekonomi.
 - Pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak (1973–1982): Pada periode ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor minyak dan gas.
 - Deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi (1983–1997): BI mengadopsi kebijakan untuk mengurangi regulasi dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Perbankan swasta tumbuh pesat, dan pasar modal berkembang.

2. Periode Setelah Krisis Ekonomi 1997

- a. Kerangka Strategis Kebijakan Moneter

Bank Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui penyesuaian suku bunga kebijakan dan implementasi GWM (*Gross Weighted Money*) rata-rata, serta kebijakan nilai tukar. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah diterapkan dengan menggunakan berbagai strategi. Strategi kebijakan yang ditempuh tidak hanya terbatas pada penargetan sasaran antara yang berupa besaran moneter, tetapi juga memperhatikan perkembangan indikator-indikator lainnya seperti suku bunga dan nilai tukar.
- b. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen untuk mengendalikan besaran moneter dan mempengaruhi perekonomian (Bank Indonesia, 2017).
- c. Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Proses operasional pengendalian moneter diawali dengan penyusunan *monetary programming* 'program moneter'. Program moneter pada dasarnya merupakan suatu perencanaan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar yang ditujukan untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter. Program moneter ini mencakup penentuan sasaran operasional kebijakan moneter. Selanjutnya, Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan serta menetapkan instrumen yang akan dipergunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut.

Dalam pelaksanaannya, hingga saat ini Bank Indonesia masih menggunakan uang primer sebagai sasaran operasional. Instrumen moneter yang digunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut adalah Operasi Pasar Terbuka (OPT), Fasilitas Diskonto, Giro Wajib Minimum (GWM), ataupun Imbauan.

Kebijakan Kuantitatif Indonesia: Kuantitas VS Harga

Kebijakan moneter kuantitatif yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam penawaran. Oleh sebab itu pengeluaran agregat perlu dikurangi melalui pengeluaran dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran masing-masing (Nur Aini Latifah, 2015).

Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan menjadi tiga tindakan, yaitu:

- a. Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka.
- b. Membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan.
- c. Membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan (Arniti Ayu Kartini, 2014).

Pendekatan berbasis kuantitas dan pendekatan berbasis harga merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam merancang kebijakan ekonomi, terutama dalam konteks kebijakan kuantitatif di Indonesia.

- a. Pendekatan Berbasis Kuantitas

Dengan pengendalian uang primer (M0) sebagai sasaran operasional, maka jumlah uang beredar di masyarakat (M1 dan M2) dapat dipengaruhi agar sejalan dengan sasaran akhir kebijakan moneter berupa kestabilan harga. Pelaksanaan kebijakan moneter dengan menggunakan target besaran moneter (M0, M1, dan M2) disebut dengan pendekatan kuantitas (*quantity-based approach*).

- b. Pendekatan Berbasis Harga
Pendekatan harga (*price-based approach*) ini menekankan peranan harga besaran moneter, yaitu suku bunga sebagai variabel yang penting dalam mentransmisikan pengaruh kebijakan moneter kepada kegiatan perekonomian.
- c. Kebijakan Kuantitatif Dan Harga Di Indonesia
Dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia, terdapat perubahan pendekatan dari kuantitas menjadi harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan transisi dari pendekatan kuantitas pada tahun 2000-2004 menuju pendekatan harga mulai tahun 2004 hingga saat ini. Pendekatan kuantitas melibatkan variabel seperti suku bunga SBI, uang primer (M0), uang beredar (M1), dan inflasi. Sementara itu, pendekatan harga melibatkan variabel seperti suku bunga SBI, suku bunga PUAB, suku bunga deposito 12 bulan bank umum, suku bunga kredit, dan inflasi.

Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Selanjutnya Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengelola cadangan devisa serta menerima pinjaman luar negeri dalam rangka pengelolaan devisa dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem nilai tukar dan lalu lintas devisa dimuat dalam UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

1. Kebijakan Nilai Tukar

Kebijakan nilai tukar adalah sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan nilai rupiah dalam bentuk uang asing (Bank Indonesia, 2020). Sistem nilai tukar terdapat tiga, yaitu:

- a. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchanged Rate*)
Pada sistem ini, nilai tukar kurs mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Pada nilai tukar ini bank sentral siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan (Belza, Putri, dan Putrisandya, 2020).
- b. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchanged Rate*)
Pada sistem ini, nilai tukar dapat berfluktuasi pada koridor atau batas yang ditetapkan oleh Otoritas Moneter. Apabila terdapat perubahan nilai tukar suatu mata uang yang menyentuh batas yang ditetapkan (*intervention band*), barulah Otoritas Moneter akan melakukan intervensi (Belza, Putri, dan Putrisandya, 2020).
- c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (*Floating Exchanged Rate*)
Pada sistem ini, nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi secara bebas seiring dengan perubahan kekuatan pasar di pasar valuta asing. Dalam kurs mengambang bebas, tidak ada nilai tukar tetap yang ditetapkan oleh pemerintah. Alih-alih, nilai tukar mata uang ditentukan oleh interaksi antara pelaku pasar, seperti bank, perusahaan, dan individu, yang membeli dan menjual mata uang dalam jumlah yang signifikan (Bayu Samudera, 2023).

2. Kebijakan Devisa

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dikatakan bahwa devisa adalah salah satu alat dan sumber pembiayaan bagi bangsa dan negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri.

Cadangan devisa atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *foreign exchange reserves* merupakan simpanan bank sentral dan otoritas moneter. Bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Sedangkan otoritas moneter Indonesia adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional (PP No. 36 Tahun 2023). Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank-bank devisa yang diperlukan untuk membiayai impor dan dikelola oleh Bank Indonesia (Jimmy Benny, 2013).

Kebijakan devisa Indonesia diarahkan untuk memelihara kondisi perekonomian yang sehat dan handal, serta mendorong ekspor dan pengendalian impor, mendukung kestabilan pasar dan kurs valuta asing. Kebijakan cadangan devisa yang dianut Indonesia adalah sistem devisa bebas, dengan perkataan lain tidak ada batasan mengenai jumlah uang yang boleh dibawa masuk dan keluar Indonesia. Sistem ini juga menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Indonesia (Subandi, 2008). Selain itu, cadangan devisa dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu jaminan bagi tercapainya stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara.

KESIMPULAN

Perkembangan perekonomian Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, karena menentukan bagaimana Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola sistem moneternya. Bank Indonesia mulai berperan aktif dalam pengendalian inflasi dan pengaturan kebijakan moneter, dengan memperkenalkan instrumen seperti

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pasca krisis, Bank Indonesia melakukan upaya menjaga stabilitas makroekonomi melalui penyesuaian suku bunga, penerapan rata-rata Uang Tertimbang Bruto (GWM), dan kebijakan nilai tukar.

Kebijakan moneter kuantitatif ini bertujuan untuk menstabilkan nilai rupiah dengan mempertimbangkan indikator seperti suku bunga. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen seperti Operasi Pasar Terbuka (OMO), Fasilitas Diskon, Giro Wajib Minimum (GWM), dan Rekomendasi. Selain itu, Indonesia telah melakukan transisi dari pendekatan berbasis kuantitas ke pendekatan berbasis harga dalam kebijakan moneternya, dengan fokus pada indikator harga seperti suku bunga SBI, suku bunga PUAB, suku bunga deposito bank umum 12 bulan, dan suku bunga kredit. Kebijakan nilai tukar didasarkan pada sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkelola, atau sistem nilai tukar mengambang bebas.

Cadangan devisa berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pengendalian ekspor dan impor. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga perekonomian yang sehat dan andal sekaligus memungkinkan pergerakan bebas mata uang asing masuk dan keluar negara. Cadangan devisa yang cukup dipandang sebagai jaminan stabilitas moneter dan makroekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2020). Kebijakan Moneter, Nilai Tukar, dan Devisa di Indonesia.
- Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia, Beberapa tahun penerbitan, Bank Indonesia.
- Benny, Jimmy. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (4), 1406-1415.
- Fleming, J.M. (1962). Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates. *IMF Staf Papers*.
- Ghosh, Atish R, Anne-Marie Gulde dan Holger C. Wolf. (2002). *ExchangeRate Regimes: Choices and Consequences*. MIT Press.
- Hartini, Rini, et al. (2023). Pengaruh Ekspor dan Penanaman Modal Asing Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 1 (2), 216-227.
- Herlina. (2013). Identifikasi mekanisme transmisi kebijakan moneter 2000-2011. *Majalah Performance*, 17 (2), 158-173.
- Kartini, A. A. (2014). Pengaruh Nilai Kurs, Inflasi, Suku Bunga Deposito, Dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. Final Assignment Bachelor Universitas Widyatama, Bandung.
- Latifah, NA (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi* , 11 (2), 124-134.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- Putri, Putu Belza Meiliana, et al. (2019). Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa. Diakses pada 29 Maret 2024, dari <https://id.scribd.com/document/498272941/KEBIJAKAN-NILAI-TUKAR-DAN-DEVISA-KEL-9>
- Rosyda. (2021). Kebijakan Moneter: Pengertian, Jenis, Tujuan dan Instrumennya. Diakses pada 29 Maret 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/kebijakan-moneter/>
- Samudera, Bayu. (2023). Mengenal sistem kurs mengambang bebas. Diakses pada 29 Maret 2024, dari <https://blog.hsb.co.id/forex/mengenal-sistem-kurs-mengambang-bebas/>
- Subandi. (2008). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tysara, Laudia. (2023). Penawaran Adalah Hubungan Positif Harga Dan Kuantitas, Pahami Hukum Dan Faktornya. Diakses pada 29 Maret 2024, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5300174/penawaran-adalah-hubungan-positif-harga-dan-kuantitas-pahami-hukum-dan-faktornya>
- Warjiyo, Perry dan Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Seri Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Warjiyo, Perry. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Seri Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Wibowo, Danti. (2020). Kebijakan Moneter Kuantitatif, Unsur Penting Pengaruhi Bisnis Anda. Diakses pada 28 Maret 2024, dari <https://www.jojonomic.com/blog/kebijakan-moneter-kuantitatif/>